



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG



**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pemalang
Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.34 Pemalang –
52313**

KATA PENGANTAR

Assalammu alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah- Nya sehingga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dapat tersusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan untuk kurun waktu satu tahun secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2021-2026 yang berjangka lima tahun. Perubahan Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang perubahan sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi perubahan untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program, kegiatan-kegiatan, dan subkegiatan-subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indicator outcome yang akan dicapai setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan sampai Triwulan II.

Dalam penyusunan Perubahan Renja ini, tidak lupa kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyusunan Perubahan Renja ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk lebih menyempurnakan Perubahan Renja ini. Semoga apa yang telah diberikan mendapat rahmat/karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Pemalang, Agustus 2024

Plt.Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Pemalang
Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Setda Kabupaten
Pemalang



AGUS IKMALUDIN, SE. MM

Pembina Tk. I

NIP. 19700828 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISIiii

BAB I PENDAHULUAN..... 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum..... 5

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 202410

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja PD
Tahun Lalu dan Capaian Renstra 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan serta Capaian Kinerja
dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 31

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH 33

BAB IV PENUTUP50

O. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat perubahan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 tanggal 4 Agustus. Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD dimaksud selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pada tahun 2024 perlu disusun perubahan Renja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang mempertimbangkan kondisi saat ini diantaranya:

1. Penyesuaian target kinerja dan pendapatan di tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2024.
2. Adanya dinamika kondisi ekonomi global dan nasional menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi.

Dari hal tersebut diatas diperlukan adanya penyesuaian target kinerja kegiatan beserta pagu indikatifnya, dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Perumusan rancangan Perubahan Renja PD bertujuan untuk menyikapi dan memperhatikan serangkaian evaluasi pada pelaksanaan kegiatan Triwulan II, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung percepatan Visi dan Misi Bupati Pemalang, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Analisis gambaran pelayanan PD pada Triwulan II.
2. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan II berdasarkan Renstra PD
3. Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
4. Telaahan terhadap RKPD Perubahan Tahun 2024
5. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
6. Perumusan kegiatan prioritas

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2024, disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, dan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

1.2 . LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Kumuh;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14)) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 -2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional periode 1 (satu) tahun untuk memberikan arah pembangunan dan sinergitas program dan kegiatan, baik yang dilakukan sendiri oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dan yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat untuk menggambarkan capaian kinerja yang dapat dituangkan ke dalam Perubahan Renja dan Perubahan RKA PD.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran informasi mengenai regulasi serta kebijakan dan strategi yang menjadi landasan penyusunan program pembangunan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang;
2. Memberikan gambaran informasi kondisi capaian pelayanan dan permasalahan yang terkait dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang pada Triwulan II.
3. Memberikan gambaran Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang untuk mencapai target pelayanan pada tahun 2024 dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

- pengawasan;
4. Sebagai pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PRAPBD) Tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang akan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang RPJMD 2021-2026.

Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu: "**TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG ADIL, MAKMUR, AGAMIS DAN NGANGENI**".

Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi, adalah sebagai berikut:

Adil, Keadaaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Makmur, Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

Agamis, Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

Ngangeni, Kondisi Kabupaten Pemalang yang adil makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Kabupaten Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. "*Kabupaten Pemalang itu ngangeni*".

Dalam mewujudkan Visi tersebut, terdapat 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong

4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan

Penyusunan Rencana Strategis Disperkim Kabupaten Pemalang sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang dominan terdapat dalam **Misi ke enam** yaitu: **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan”**.

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan infrastruktur yang mantap dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup melalui peningkatan cakupan universal akses yaitu peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh. Disamping itu misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang sesuai tata ruang.

Berdasarkan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2024, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang pada Anggaran Penetapan melaksanakan 2 Urusan, 8 Program, 21 Kegiatan, dan 43 Sub Kegiatan, dan pada Perubahan Renja akan melaksanakan 2 Urusan, 8 Program, 21 Kegiatan, dan 43 Sub Kegiatan. Total Anggaran pada APBD Penetapan Tahun 2024 sebesar Rp. 47.474.308.000,- Adapun Program dan Kegiatan Disperkim Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan
 - a) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - b) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - c) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - d) Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - e) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
 - a) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - b) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - a) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - a) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a) Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - a) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Penatagunaan Tanah
 - a) Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - e) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - f) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - g) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h) Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i) Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada umumnya belum dapat terlaksana dengan optimal. Progres Capaian Kinerja baru tercapai 30,51%, dari target 50,00%. Adapun yang menjadi penyebab adalah pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan Fisik/Infrastruktur yang terlambat dalam proses pengadaan barang/jasa, sehingga pelaksanaan pekerjaan juga mengalami keterlambatan.
- b. Hambatan yang dihadapi sebagian besar berkaitan dengan pelaksanaan teknis di lapangan baik itu berkaitan dengan pihak pengguna maupun dengan penyedia.

Pencapaian target berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian target tahun berjalan (2024) dijabarkan dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Tahun 2024
Dan Pencapaian RENSTRA Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman s/d Triwulan II Tahun
2024.

No	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)				Realisasi Kinerja dan anggaran Renja OPD pada Triwulan II (Tahun 2024)												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Tahun 2024		Status Capaian	Ket	Rincian Target Capaian
			Penetapan		Perubahan		I		II		III		IV		TOTAL										
Indikator	Satuan	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	%	Rp. (000)						
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 (7+8+9+10)		12(11/5*100)		13	14	15		
A	1,04	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																							
	1,04,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai IKM	Nilai	80,5	26.017.983.000		-	0,00	6.028.649.312	78,92	6.215.221.955		-		-	0,00	12.781.122.332	0,00	49,12	Sangat Tinggi				
I		Nilai SAKIP	Nilai	62,5	-		0,00		-		0,00		0,00												
		Nilai IRB	Nilai	66,0	-		0,00		-		0,00		0,00												
1	1.04 . 1.04.01 . 01,01	Perencanaan Penganggaran , dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran ,pengendalian,laporan kinerja,keuangan,SDM yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi OPD	dokumen	42	130.000.000	-	-	7	8.538.000	12	18.416.000	-	-	-	-	19	26.954.000	45,24	20,73	Sangat Rendah				

1	1.04 . 1.04.01 . 01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	dokumen	6	20.000.000	-	-	1	4.520.000	2	7.475.000	-	-	-	-	3	11.995.000	50,00	59,98	Sangat Tinggi		Terdiri dari Dok. Renja, Renja Perubahan, Data RKPD, KUAPP AS, Rencana Aksi, Cascading,
2	1.04 . 1.04.01 . 01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	3	5.000.000	-	-	-	218.000	1	-	-	-	-	-	1	218.000	33,33	4,36	Sangat Rendah		
3	1.04 . 1.04.01 . 01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	4	5.000.000	-	-	-	-	2	744.500	-	-	-	-	2	744.500	50,00	14,89	Sangat Rendah		Terdiri dari Dok. RKA Pergeseran dan Perubahan
4	1.04 . 1.04.01 . 01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	5.000.000	-	-	-	950.000	-	-	-	-	-	-	-	950.000	-	19,00	Sedang		

5	1.04 . 1.04.01 . 01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4	5.000.000	-	-	-	-	1	300.000	-	-	-	-	1	300.000	25,00	6,00	Sangat Rendah		Terdiri dari Dok. DPA Pergeseran dan Perubahan
6	1.04 . 1.04.01 . 01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	12	30.000.000	-	-	3	2.850.000	3	8.930.000	-	-	-	-	6	11.780.000	50,00	39,27	Sangat Tinggi		Terdiri dari Dok Laporan Capaian Kinerja, SAKIP, SPM, LKJIP, LPPD, LKPJ
7	1.04 . 1.04.01 . 01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	12	60.000.000	-	-	3	-	3	966.500	-	-	-	-	6	966.500	50,00	1,61	Sangat Rendah		Terdiri dari Dok Evaluasi TW RKPD, dan IKM
2	1.04 . 1.04.01 . 01,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		28	6.163.163.000	-	-	6	1.290.419.279	8	1.628.740.638	-	-	-	-	14	2.919.159.917	50,00	47,36	Sangat Tinggi		
8	1.04 . 1.04.01 . 01,02,01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah gaji dan tunjangan ASN terbayar	Bulan	14	6.150.663.000	-	-	3	1.290.419.279	5	1.628.541.138	-	-	-	-	8	2.918.960.417	57,14	47,46	Sangat Tinggi		Terdiri dari Dok. SPM Gaji dan TPP

9	1.04 . 1.04.01 . 01,02,05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah laporan akhir Penyusunan tersusun	Laporan	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah		Dokumen Laporan Akhir Tahun Sebelumnya	
10	1.04 . 1.04.01 . 01,02,07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semester an SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semester SKPD.Tersusun	Laporan	12	5.000.000	-	-	3	-	3	199.500	-	-	-	-	6	199.500	50,00	3,99	Sangat Rendah		Terdiri dari Laporan TW
11	1.04 . 1.04.01 . 01,02,08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	dokumen	1	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah		terdiri Dari Dokumen Prognosis	
3	1,04,1,04,01 ,01,03	Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	2.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	50,00	Sangat Tinggi		
12	1,04,1,04,01, 01,03,06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	2.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	50,00	Sangat Tinggi		
4	1,04,01,2,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	12	5.000.000	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-	50,00	-	Sangat Rendah		

13	1,04,01,2,04,07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	5.000.000	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-	50,00	-	Sangat Rendah		Terdiri dari laporan Pendapatan bulanan
5	1,04,1,04,01,01,05	Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah		280	300.000.000	-	-	50	500.000	150	239.240.000	-	-	-	-	200	239.740.000	71,43	79,91	Sangat Tinggi		
14	1,04,1,04,01,01,05,10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	oran g	280	300.000.000	-	-	50	500.000	150	239.240.000	-	-	-	-	200	239.740.000	71,43	79,91	Sangat Tinggi		
6	1,04,1,04,01,01,06	Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah	Paket	16	240.000.000	-	-	3	48.182.740	3	28.026.020	-	-	-	-	6	76.208.760	37,50	31,75	Tinggi		
15	1,04,1,04,01,01,16,02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	paket	1	25.000.000	-	-	-	13.201.240	-	3.209.900	-	-	-	-	-	16.411.140	-	65,64	Sangat Tinggi		
16	1,04,1,04,01,01,06,03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang di Sediakan	paket	1	20.000.000	-	-	-	3.409.000	-	3.980.820	-	-	-	-	-	7.389.820	-	36,95	Tinggi		
17	1,04,1,04,01,01,06,05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	1	15.000.000	-	-	-	2.418.500	-	4.407.500	-	-	-	-	-	6.826.000	-	45,51	Sangat Tinggi		

18	1,04 ,1,04,01,01, 06,07	Penyediaa n Bahan/Ma terial.	Jumlah Paket bahan/ Material yang disedi ak an	pake t	1	30.000.000	-	-	-	7.950.000	-	5.207.800	-	-	-	-	-	13.157.800	-	43,86	Sanga t Tinggi		
19	1,04 ,1,04,01,01, 06,09	Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD	Lapo ran	12	150.000.000	-	-	3	21.204.000	3	11.220.000	-	-	-	-	6	32.424.000	50, 00	21,62	Sanga t Rend ah		
7	1,04,1,04,01 ,01, 07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerinta h daerah	Tersedia nya Barang Milik daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah daerah	pake t	1	13.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sang at Rend ah		
20	1.04.01.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralata n dan Mesin Lainnya	pake t	1	13.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sanga t Rend ah		
8	1,04, 1,04,01,01, 08	Penyediaa n Jasa penunjang Urusan Daerah	Terlaksa nanya Jasa penunja ng Urusan Daerah	Lapo ran	24	18.990.000.0 00	-	-	6	4.638.996. 793	6	4.806.264.2 13	-	-	-	-	12	9.445.261.00 6	50, 00	49,74	Sang at Tingg i		
21	1,04, 1,04,01,01, 08,02	Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disedi ak an	Lapo ran	12	17.760.000.00 0	-	-	3	4.440.035.9 19	3	4.416.330.5 81	-	-	-	-	6	8.856.366.50 0	50, 00	49,87	Sanga t Tinggi		

22	1,04, 1,04,01,01, 08,4	Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang disedi ak an	Lapo ran	12	1.230.000.000	-	-	3	198.960.87 4	3	389.933.632	-	-	-	-	6	588.894.506	50, 00	47,88	Sanga t Tinggi		
9	1,04, 1,04,01,01, 09	Pemeliha aan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Terlaksa nanya Pemeli araan Barang Milik daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah	Unit	71	174.500.000	-	-	31	42.012.500	8	11.867.000	-	-	-	-	39	72.798.649	54, 93	41,72	Rendah		
23	1.04.01.2.09. 01	Penyediaa n jasa pemelihaa an biaya pemelihara an dan pajak kendaraaa n perseorang andinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraa n perorang an dinas atau kendaraa n dinas jabatan yang dipelihar a dan dibayark an pajaknya	Unit	43	50.000.000	-	-	12	13.090.500	13	18.919.149	3	-	-	-	28	32.009.649	65, 12	64,02	Sanga t Tinggi		
24	1,04, 1,04,01,01, 09,02	Penyediaa n Jasa Pemeliha an, Biaya Pemeliha an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan.	Jumlah Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliha raan, Pajak, dan Perizinan Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n.	Unit	4	20.000.000	-	-	1	4.507.000	1	7.812.000	-	-	-	-	2	12.319.000	50, 00	61,60	Sanga t Tinggi		
25	1,04, 1,04,01,01, 09,06	Pemeliha an Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah Pemeliha raan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Unit	66	54.500.000	-	-	30	24.415.000	7	4.055.000	-	-	-	-	37	28.470.000	56, 06	52,24	Sanga t Tinggi		

26	1,04, 1,04,01,01, 09,09	Pemelihara an/rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung yang terpeliha ra	Unit	1	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sanga t Rend ah		
27	1.04.01.2.09. 10	Pemelihara an/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran a gedung kantor atau banguna n lainya yang dipelihar a / direhabil itasi	Unit	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sanga t Rend ah		
II	1,04,02	PROGRAM PENGEMB ANGAN PERUMAH AN	Penyedi aan dan rehabilit asi rumah layak huni bagi korban bencana kabupat en / kota	%	100	230.000.000		-	-	41.624.795	-	27.687.000	-	-		-	-	69.311.795	0,0 0	30,14	Seda ng		
			Fasilita si penyedi aan rumah layak huni bagi masyara kat terdamp ak relokasi program pemerin tah kabupat en / kota	%	100				-		-		-	-		-			0,0 0				

10	1,04,1,04,01,01,15	Pendataan penyediaa n dan rehabilitasi Rumah korban Bencana atau relokasi program Kab/kota	Terlaksana nya Pendataan penyedi aan dan rehabilitasi Rumah korban Bencana atau relokasi program Kab/kota	Laporan	1	10.000.000	-	-	-	5.542.500	-	800.000	-	-	-	-	-	6.342.500	-	63,43	Sangat Tinggi		
28	1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen data calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/kota yang terverifikasi	dokumen	1	10.000.000	-	-	-	5.542.500	-	800.000	-	-	-	-	-	6.342.500	-	63,43	Sangat Tinggi		
11	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaa n dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		orang	150	35.000.000			35	5.595.695	25	5.055.000		-		-	60	10.650.695	40,00	30,43	Rendah		

29	1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang/su karelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota	orang	100	10.000.000	-	-	25	2.319.995	15	1.675.000	-	-	-	-	40	3.994.995	40,00	39,95	Sedang		
30	1.04.02.2.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	orang	50	25.000.000	-	-	10	3.275.700	10	3.380.000	-	-	-	-	20	6.655.700	40,00	26,62	Rendah		
12	1,04,1,04,01,01,17	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten /kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten /kota	Rumah,Domokumen	15	90.000.000	-	-	-	3.961.400	-	4.440.000	-	-	-	-	-	8.401.400	-	9,33	Sangat Rendah		
31	1,04,1,04,01,01,17,01	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana.	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana terrehabilitasi	Rumah	15	90.000.000	-	-	-	3.961.400	-	4.440.000	-	-	-	-	-	8.401.400	-	9,33	Sangat Rendah		

13	1,04, 1,04,01,01, 19	Pembinaa n Pengelolaa n Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terselen ggarany a Pembina an Pengelol aan Rumah Susun Umum dan/ata u Rumah Khusus	Lapo ran	12	80.000.000	-	-	3	21.520.000	3	16.122.000	-	-	-	-	6	37.642.000	50, 00	47,05	Sang at Tingg i		
32	1,04, 1,04,01,01, 19,01	Fasilitas Pengelolaa n Kelembaga an dan Pemilik/Pe nghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pengelola an Kelemba gaan dan Pemilik/ Penghun i Rumah Susun	Lapo ran	1	45.000.000	-	-	-	13.454.000	-	12.968.000	-	-	-	-	-	26.422.000	-	58,72	Sanga t Tinggi		
33	1,04, 1,04,01,01, 19,02	Penatausa haan Pemanfaat an Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Susun Umum dan/ata u Rumah Khusus terpeliha ra	Lapo ran	12	35.000.000	-	-	3	8.066.000	3	3.154.000	-	-	-	-	6	11.220.000	50, 00	32,06	Tinggi		
14	1.04.02.2.06	Penerbita n Izin Pembangu nan dan Pengemba ngan Perumaha n	Terselen ggarany a Penerbit an Izin Pemban gunan dan Pengem bangan Peruma han	Dok eme n	15	15.000.000	-	-	5	5.005.200	2	1.270.000	-	-	-	-	7	6.275.200	46, 67	41,83	Tingg i		

34	1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	dokumen	15	15.000.000			5	5.005.200	2	1.270.000	-	-	-	-	7	6.275.200	46,67	41,83	Tinggi		
III		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas Kawasan Permukiman Kumuh	%	1,09	10.901.325.000		-	0,96	60.881.518		472.150.534	-	-	-	-	0,96	533.032.052	96,25	4,89	Sangat Rendah		
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	65				62,56								62,56						
15	1,04,1,04,03,2,02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terselenggaranya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh	Laporan	1	25.000.000	-	-	-	-	-	4.646.000	-	-	-	-	-	4.646.000	-	18,58	Sangat Rendah		

			) Ha																				
35	1,04, 1,04,03,2,02, 04	Penyadara n Publik Pencegaha n Tumbuh dan berkemban gnya Permukim an Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksan aan Penyadar an Publik Pencega han tumbuh dan berkemb angnya permuki man kumuh	Lapo ran	1	25.000.000	-	-	-	-	-	4.646.000	-	-	-	-	-	4.646.000	-	18,58	Sanga t Rend ah		
16	1,04, 1,04,03,2,03	Peningkat an Kualitas Kawasan Permukim an Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terselen garany a Peningk atan Kualitas Kawasan Permuki man Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Unit	57	10.876.325.0 00	-	-	-	60.881.518	6	467.504.53 4	-	-	-	-	6	528.386.052	10, 53	4,86	Sang at Rend ah		
36	1,04, 1,04,03,2,03. 12	Pembangu nan Rumah Baru Layak Huni untuk peningkata n Kualitas Permukim an Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Pembang unan Rumah Baru Layak Huni untuk peningka tan Kualitas Permuki man Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh)	Unit	57	10.876.325.00 0	-	-	-	60.881.518	6	467.504.534	-		-	-	6	528.386.052	10, 53	4,86	Sanga t Rend ah		

			Ha																				
IV		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH yang tertangan ini	%	37	1.050.000.000		-	29,09	45.405.600	-	87.734.400		-		-	29,09	133.140.000	78,62	12,68	Sangat Rendah		
			Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	63				-		36,00						36,00		57,14				
17	1,04, 1,04,01,01, 25	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	rumah	45	1.050.000.000	-	-	-	45.405.600	5	87.734.400	-	-	-	-	5	133.140.000	11,11	12,68	Sangat Rendah		
37	1,04, 1,04,01,01, 25,01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah rumah tidak layak huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan	rumah	45	1.050.000.000				45.405.600	5	87.734.400					5	133.140.000	11,11	12,68	Sangat Rendah		

		dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																				
V		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA UTILITAS UMUM (PSU)	PERSEN TASE PSU DALAM KONDISI BAIK	%	56	6.705.000.000	-	-	-	118.931.500	8	780.316.021	-	-	-	-	9	901.780.521	16,07	13,45	Sangat Rendah		
18	1,04, 1,04,01,01, 26	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terselenggaraan PSU Perumahan	Lokasi	56	6.705.000.000	-	-	-	118.931.500	8	780.316.021	-	-	-	-	9	901.780.521	16,07	13,45	Sangat Rendah		
38	1,04, 1,04,01,01, 26,02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	lokasi	40	6.680.000.000	-	-	-	118.931.500	8	780.316.021	-	-	-	-	8	899.247.521	20,00	13,46	Sangat Rendah		
39	2 04 05 2.01 03	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	Laporan	10	10.000.000	-	-	-	-	1	1.483.000	-	-	-	-	1	1.483.000	10,00	14,83	Sangat Rendah		

40	3 04 05 2.01 04	verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembangan	Jumlah hasil serah terima PSU perumahan yang terverifikasi dari pengembangan	perumahan	6	15.000.000	-	-	-	-	-	1.050.000	-	-	-	-	-	1.050.000	-	7,00	Sangat Rendah		
VI		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROSE TASE PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			10.000.000	-	-	2	1.614.000	1	1.075.000	-	-	-	-	3	2.689.000	30	26,89	Rendah		
19	1,04, 1,04,06,02,01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Terselenggaranya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	rumah	10	10.000.000	-	-	2	1.614.000	1	1.075.000	-	-	-	-	3	2.689.000	30,00	26,89	Rendah		

41	1,04, 1,04,06,02,0 1,01	Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Regsitrase Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	JumlahK oordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Regsitrase Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Lapo ran	10	10.000.000	-	-	2	1.614.000	1	1.075.000	-	-	-	-	3	2.689.000	30,00	26,89	Rend ah		
B	2.04.1.04.01	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN PERTANAHAN	TERWUJUDNYA PENYEL ESAIAN SENGKET A PERTANAHAN																				
VII	2.04.1.04.01.01	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKET A TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSEN TASE SENGKET A TANAH YANG DITANGANI	berit a acar a	4	30.000.000	-	-	1,00	2.727.500	1	11.841.500,000		-		-	2	14.569.000	50,00	48,56	Sang at Tinggi		
20	2,04, 1,04,01,01, 18	PENYELESAIAN SENGKET A TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Pertama han yang dilakukakan	berit a acar a	4	30.000.000	-	-	1	2.727.500	1	11.841.500	-	-	-	-	2	14.569.000	50,00	48,56	Sang at Tinggi		
42	2,04, 1,04,01,01, 18,02	Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1(satu) daerah kabupaten /kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa tanah garapan dalam 1(satu) daerah kabupaten /kota	berit a acar a	4	30.000.000			1	2.727.500	1	11.841.500					2	14.569.000	50,00	48,56	Sang at Tinggi		

VIII		PROGRAM PENATAG UNAAN TANAH	Persenta se Fasilitas i Bidang tanah yang bersertif ikat	%	95	2.530.000.00 0	-	-	-	17.600.000	1	32.598.500	-	-	-	-	1	50.198.500	1,0 5	1,98	Sang at Rend ah		
21	2,04, 1,04,01,01, 26	Pengguna an tanah yang hamparan nya dalam satu daerah kabupaten	Terlaksa naya Penggun aan tanah yang hampara nnya dalam satu daerah kabupat en	%	4	2.530.000.00 0	-	-	-	17.600.000	1	32.598.500	-	-	-	-	1	50.198.500	25, 00	1,98	Sang at Rend ah		
43	2,04, 1,04,01,01, 26,01	koordinasi dan Sinkronisa si perencana an penggunaa n tanah	jumlah laporan koordinasi dan Sinkroni sasi perencan aan penggun aan tanah	Lapo ran	4	2.530.000.000	-	-	-	17.600.000	1	32.598.500	-	-	-	-	1	50.198.500	25, 00	1,98	Sanga t Rend ah		
JUMLAH TOTAL						47.474.308. 000		-		6.317.434. 225		7.628.624.9 10		-		-		14.485.843.2 00		30,51	Renda h		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja: sumber daya manusia yang handal yang tercukupi																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : - kurangnya koordinasi internal																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengoptimalkan segala sumber Daya yang ada agar capaian sesuai dengan target yang ditentukan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD Kabupaten/kota berikutnya :																							

Disusun

**Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
PEMALANG**

KEPALA DPU – TR KAB. PEMALANG



JOKO TRI ASMORO, ST., M.Si
Pembina
NIP. 19760606 200501 1 021

Dievaluasi

Pemalang, Juli 2024

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
PEMALANG**

Dr. Drs. MOH. SIDIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660923 199303 1 003

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan serta Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang pada Tahun 2024 menyelenggarakan 2 Urusan Wajib Pemerintahan yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat, dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan. Urusan ini dilaksanakan dengan 8 Program, 21 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan.

Capaian kinerja pelayanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 indikator kinerja pelayanan mengacu pada SPM dan IKK berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang 2021 – 2026. Dalam menentukan tolak ukur dan indikator kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, selalu mengacu pada Indikator Kinerja Utama pada RPJMD sebagai indikator yang harus dicapai kepala daerah, indikator ini digunakan sebagai tujuan dari Kepala Perangkat Daerah (Kepala Dinas) sebagai Indikator Tujuan pada sektor Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang kemudian dijabarkan sebagai indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan pada level Eselon III dan Eselon IV.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman tercantum dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Capaian Renja	Target Renja	Capaian Renja TW II	Ket.
				(n-1) 2023	(n) 2024	(n) 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(11)	(13)
1.	Persentase Cakupan Wilayah Kumuh di Bawah 10Ha.	Standar Nasional		67,36 %	75,00%	18,58%	
2.	Persentase Kawasan Kumuh tertangani	Standar Nasional		0,91 %	0,85%	4,86%	
3.	Persentase Kawasan Permukiman yang memiliki PSU dalam Kondisi baik.		IKK	54,45 %	39,00%	13.45%	
4.	Persentase RTLH yang tertangani		IKK	30,66 %	37,00%	-%	
5.	Persentase berkurangnya RTLH		IKK	67,00 %	63,00%	-%	
6.	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana	SPM		100 %	100%	-%	
7.	Persentase rumah layak huni akibat relokasi/program	SPM		100 %	100%	-%	
8.	Persentase konflik tanah Garapan tertangani		IKK	78,50 %	70%	48,56%	
9.	Persentase sertifikat kepemilikan hak atas tanah yang terfasilitasi		IKK	71,51%	85,00%	71,51%	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Disperkim pada Perubahan Renja Tahun 2024 mengajukan Usulan sebanyak 7 (Tujuh) Program dengan 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan, dan 44 (Empat Puluh Empat) Sub Kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 46.236.303.000,- (Empat puluh enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 40.117.063.000,- (Empat Puluh Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 6.119.240.000,- (Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Adapun Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan untuk Perubahan RKPD Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Pemalang Tahun 2024

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Su mber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun N - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	B elanja Tidak Terdu ga	Bela nja Transf er	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	B elanja Tidak Terdu ga	Bela nja Transf er	Jumlah (Rp)	
1	04	01	2,04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	- Kab. Pemalang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa											Rp. 1.000.000,00	
1	04	01	2,04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	- Kab. Pemalang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 1.150.000				Rp. 1.150.000	Rp. 10.000.000,00
1	04	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 300.000.000				Rp. 300.000.000	Rp. 400.000.000				Rp. 400.000.000	Rp. 3.100.000,00
1	04	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	- Kab. Pemalang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa											Rp. 1.000.000,00	
						Umu	n, Semua												

						m-Dana Alokasi Umum	Kel/Desa												
1	04	01	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 1.000.000,00
1	04	01	2,05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 300.000.000				Rp. 300.000.000	Rp. 400.000.000				Rp. 400.000.000	Rp. 1.000.000,00
1	04	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 100.000,00
1	04	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 240.000.000				Rp. 240.000.000	Rp. 235.560.000				Rp. 235.560.000	Rp. 260.650.000,00
1	04	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 3.000.000				Rp. 3.000.000	Rp. 1.000.000,00

1	04	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 29.000.000				Rp. 29.000.000	Rp. 27.500.000,00
1	04	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 22.000.000,00
1	04	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 18.500.000				Rp. 18.500.000	Rp. 16.500.000,00
1	04	01	2,06	0007	Penyediaan Bahan/Material	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 33.000.000,00
1	04	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pemalang, Semua Kecamatan		Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 130.060.000				Rp. 130.060.000	Rp. 160.650.000,00

						m	n, Semua Kel/Desa												
1	04	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 13.320.000			Rp. 13.320.000		Rp. 13.320.000			Rp. 13.320.000	Rp. 3.000.000,00	
1	04	01	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa											Rp. 1.000.000,00	
1	04	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa											Rp. 1.000.000,00	
1	04	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.320.000			Rp. 13.320.000		Rp. 13.320.000			Rp. 13.320.000	Rp. 1.000.000,00	
1	04	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 18.990.000.000			Rp. 18.990.000.000	Rp. 18.981.000.000				Rp. 18.981.000.000	Rp. 20.630.400.000,00		
1	04	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dana Transfer Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa											Rp. 1.000.000,00	
						m	n, Semua Kel/Desa												

						Dana Alokasi Umum													
1	04	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 17.760.000.000				Rp. 17.760.000.000	Rp. 17.751.000.000				Rp. 17.751.000.000	Rp. 19.250.000.000,00
1	04	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.230.000.000				Rp. 1.230.000.000	Rp. 1.230.000.000				Rp. 1.230.000.000	Rp. 1.379.400.000,00
1	04	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 174.500.000				Rp. 174.500.000	Rp. 202.500.000				Rp. 202.500.000	Rp. 190.000.000,00
1	04	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 58.000.000				Rp. 58.000.000	Rp. 55.000.000,00
1	04	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	Rp. 22.000.000,00

						m													
1	04	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 54.500.000				Rp. 54.500.000	Rp. 54.500.000				Rp. 54.500.000	Rp. 55.000.000,00
1	04	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	Rp. 45.500.000,00
1	04	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 12.500.000,00
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				Rp. 230.000.000				Rp. 230.000.000	Rp. 315.000.000				Rp. 315.000.000	Rp. 275.100.000,00
1	04	02	2,01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 18.500.000,00
1	04	02	2,01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	- Dana Transfer Umum-	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 1.000.000,00
						Dana													

						Aloka si Umu m													
1	0 4	0 2	2,0 1	000 8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	- Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	- Kab. Pemalang, Pemalang, Sugihwara s		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 17.500.000,00
1	0 4	0 2	2,0 2		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 75.000.000				Rp. 75.000.000	Rp. 55.000.000,00
1	0 4	0 2	2,0 2	000 1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	- Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 27.500.000,00
1	0 4	0 2	2,0 2	000 9	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	- Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	Rp. 27.500.000,00
1	0 4	0 2	2,0 3		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				Rp. 90.000.000				Rp. 90.000.000	Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 92.600.000,00

1	04	02	2,03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa - Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa		Rp. 90.000.000				Rp. 90.000.000	Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 91.500.000,00
1	04	02	2,03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa												Rp. 1.000.000,00
1	04	02	2,03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa												Rp. 100.000,00
1	04	02	2,04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota														Rp. 2.000.000,00
1	04	02	2,04	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 1.000.000,00
1	04	02	2,04	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	- Dana Transfer Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua												Rp. 1.000.000,00

						m-Dana Alokasi Umum	Kel/Desa												
1	04	02	2,05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				Rp. 80.000.000				Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000				Rp. 80.000.000	Rp. 90.000.000,00
1	04	02	2,05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	- Dana Transfer Umum-m-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 45.000.000				Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000				Rp. 45.000.000	Rp. 50.000.000,00
1	04	02	2,05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	- Dana Transfer Umum-m-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Pemalang, Kebondalem		Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 40.000.000,00
1	04	02	2,06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 17.000.000,00
1	04	02	2,06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	- Dana Transfer Umum-m-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 16.000.000,00
1	04	02	2,06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	- Dana Transfer Umum-m-Dana	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 1.000.000,00

						Aloka si Umu m													
1	0 4	0 3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				Rp. 5.812.480.0 00	Rp. 5.088.845. 000			Rp. 10.901.325. 000	Rp. 5.812.480.0 00	Rp. 3.805.920. 000			Rp. 9.618.400.0 00	Rp. 30.000.000,00
1	0 4	0 3	2,0 2		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 28.000.000,00
1	0 4	0 3	2,0 2	000 4	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	- Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	- Kab. Pemalang, Pemalang, Kebondale m - Kab. Pemalang, Pemalang, Mulyoharj o - Kab. Pemalang, Pemalang, Sugihwara s - Kab. Pemalang, Pemalang, Widuri		Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 26.000.000,00
1	0 4	0 3	2,0 2	000 8	Penyusunan/Review/Le galisasi Kebijakan Bidang PKP	- Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	- Kab. Pemalang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa												Rp. 1.000.000,00
1	0 4	0 3	2,0 2	001 2	Pembentukan/Pembina an Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	- Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	- Kab. Pemalang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa												Rp. 1.000.000,00

1	04	03	2,03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				Rp. 5.787.480.000	Rp. 5.088.845.000			Rp. 10.876.325.000	Rp. 5.787.480.000	Rp. 3.805.920.000			Rp. 9.593.400.000	Rp. 2.000.000,00
1	04	03	2,03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	- Dana Transfer Umu m- Dana Alokasi Umu m	- Kab. Pemalang, Pemalang, Kebondalem - Kab. Pemalang, Pemalang, Pelutan - Kab. Pemalang, Petarukan, Petarukan												Rp. 1.000.000,00
1	04	03	2,03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	- Dana Transfer Umu m- Dana Alokasi Umu m - Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.787.480.000	Rp. 5.088.845.000			Rp. 10.876.325.000	Rp. 5.787.480.000	Rp. 3.805.920.000			Rp. 9.593.400.000	Rp. 1.000.000,00
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				Rp. 1.050.000.000				Rp. 1.050.000.000	Rp. 1.050.000.000				Rp. 1.050.000.000	Rp. 76.500.000,00
1	04	04	2,01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 1.050.000.000				Rp. 1.050.000.000	Rp. 1.050.000.000				Rp. 1.050.000.000	Rp. 76.500.000,00

1	04	04	2,01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Ampelgading, Tegalsari Barat - Kab. Pemalang, Ulujami, Kaliprau		Rp. 1.050.000.000					Rp. 1.050.000.000	Rp. 1.050.000.000				Rp. 1.050.000.000	Rp. 75.500.000,00
1	04	04	2,01	0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa													Rp. 1.000.000,00
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				Rp. 6.705.000.000					Rp. 6.705.000.000	Rp. 6.990.000.000				Rp. 6.990.000.000	Rp. 748.500.000,00
1	04	05	2,01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				Rp. 6.705.000.000					Rp. 6.705.000.000	Rp. 6.990.000.000				Rp. 6.990.000.000	Rp. 748.500.000,00
1	04	05	2,01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa													Rp. 1.000.000,00
1	04	05	2,01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa - Kab. Pemalang, Taman, Beji		Rp. 6.680.000.000					Rp. 6.680.000.000	Rp. 6.965.000.000				Rp. 6.965.000.000	Rp. 720.000.000,00

1	04	05	2,01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 11.000.000,00
1	04	05	2,01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 16.500.000,00
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 11.500.000,00
1	04	06	2,01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil				Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 11.500.000,00
1	04	06	2,01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 11.500.000,00

2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 260.000.000	Rp. 2.300.000.000			Rp. 2.560.000.000	Rp. 260.000.000	Rp. 2.300.000.000			Rp. 2.560.000.000	Rp. 193.000.000,00
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				Rp. 260.000.000	Rp. 2.300.000.000			Rp. 2.560.000.000	Rp. 260.000.000	Rp. 2.300.000.000			Rp. 2.560.000.000	Rp. 193.000.000,00
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 46.000.000,00
2	10	04	2,01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 46.000.000,00
2	10	04	2,01	0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Petarukan, Kendaldoyong												Rp. 1.000.000,00
2	10	04	2,01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Watukumpul, Tlagasana - Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa - Kab. Pemalang, Bodeh, Parunggali - Kab. Pemalang, Bantarbolang, Karanganyar		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 45.000.000,00
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN														Rp. 100.000.000,00

2	1	0	2,0		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													Rp. 100.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	- Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa											Rp. 100.000.000,00
2	1	0	1		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			Rp. 230.000.000	Rp. 2.300.000.000			Rp. 2.530.000.000	Rp. 230.000.000	Rp. 2.300.000.000			Rp. 2.530.000.000	Rp. 47.000.000,00
2	1	0	2,0		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 230.000.000	Rp. 2.300.000.000			Rp. 2.530.000.000	Rp. 230.000.000	Rp. 2.300.000.000			Rp. 2.530.000.000	Rp. 47.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 230.000.000	Rp. 2.300.000.000			Rp. 2.530.000.000	Rp. 230.000.000	Rp. 2.300.000.000			Rp. 2.530.000.000	Rp. 47.000.000,00
Jumlah								Rp. 40.072.143.000	Rp. 7.402.165.000			Rp. 47.474.308.000	Rp. 40.117.063.000	Rp. 6.119.240.000			Rp. 46.236.303.000	Rp. 28.044.589.150,00

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
				Sebelum	Sesudah	(Rp.)	%
4			PENDAPATAN DAERAH				
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 260.000.000	Rp. 260.000.000	Rp. 0	0 %
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 260.000.000	Rp. 260.000.000	Rp. 0	0 %
Jumlah Pendapatan				Rp. 260.000.000	Rp. 260.000.000	Rp. 0	0 %
5			BELANJA DAERAH				
5	1		BELANJA OPERASI	Rp. 40.072.143.000	Rp. 40.117.063.000	Rp. 44.920.000	0,11 %
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 6.150.663.000	Rp. 5.681.786.000	(Rp. 468.877.000)	7,62 %
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 32.901.480.000	Rp. 33.340.277.000	Rp. 438.797.000	1,33 %
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.020.000.000	Rp. 1.095.000.000	Rp. 75.000.000	7,35 %
5	2		BELANJA MODAL	Rp. 7.402.165.000	Rp. 6.119.240.000	(Rp. 1.282.925.000)	17,33 %
5	2	01	Belanja Modal Tanah	Rp. 2.300.000.000	Rp. 2.300.000.000	Rp. 0	0 %
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 13.320.000	Rp. 13.320.000	Rp. 0	0 %
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 5.088.845.000	Rp. 3.805.920.000	(Rp. 1.282.925.000)	25,21 %
Jumlah Belanja				Rp. 47.474.308.000	Rp. 46.236.303.000	(Rp. 1.238.005.000)	2,6 %
Total Surplus / (Defisit)				(Rp. 47.214.308.000)	(Rp. 45.976.303.000)	Rp. 1.238.005.000	2,62 %

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun ke-4, periode renstra 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan PD Perubahan APBD Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Pemalang, Agustus 2024

Plt.Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Kabupaten Pemalang
Asisten Perencanaan dan Pembangunan
Setda Kabupaten Pemalang


AGUS IKMALUDIN, SE. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700828 199203 1 006

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 000.7/002306/PERKIM/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026;
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja;
- b. merumuskan dan menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 22 Agustus 2024

Plt.Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Kabupaten Pemalang
Asisten Perencanaan dan Pembangunan
Setda Kabupaten Pemalang



ACUS IKMALUDIN, SE. MM

Pembina Tk. I

NIP. 19700828 199203 1 006

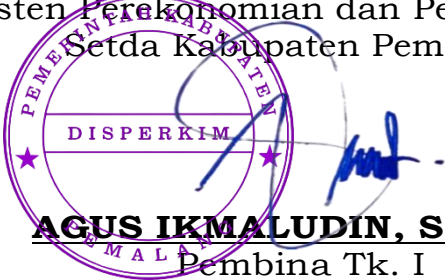
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMANKABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 000.7/002306 /TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG**

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang	Anggota	
4.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Bina Program Dan Keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang	Anggota	
6.	Kepala Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang	Anggota	
7.	Kepala UPT Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
8.	Penelaah Kebijakan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota	ADDIN WIDI WICAKSONO, S.T
9.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	Anggota	SRI HARY MURTY, S.Hut

Plt.Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Kabupaten Pemalang
Asisten Perencanaan dan Pembangunan
Setda Kabupaten Pemalang



AGUS IKMALUDIN, SE. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700828 199203 1 006

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2024
Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Pemalang**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten /kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan - Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Pemalang, Agustus 2024

Plt.Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Pemalang
Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Setda Kabupaten
Pemalang



AGUS IKMALUDIN, SE. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700828 199203 1 006

Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.